



PEMBUKAAN HUTAN SEMAKIN NYATA

BERAU BISA JADI SUMATERA BERIKUTNYA

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 2





Banjir Tahunan Bisa Berubah Jadi Bencana Ekstrem

BANJIR besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, yang diiringi gelondongan kayu dari hulu hutan yang rusak, harus menjadi alarm waspada bagi Kabupaten Berau. Meskipun bencana air di bantaran Sungai Kelay dan Segah dianggap “fenomena biasa” oleh warga setempat, frekuensi dan skala kejadian ekstrem di Berau belakangan ini menunjukkan adanya perubahan serius pada kapasitas lingkungan.

“Ini sebenarnya banjir tahunan. Dan warga di sana sudah biasa dengan itu. Di bulan-bulan yang curah hujan tinggi disertai fenomena banjir rob,” kata Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Muhandi.

Meski begitu, ada beberapa kejadian banjir yang di luar perkiraan. Bahkan, pada 2025, terjadi dua kali fenomena banjir cukup besar, yakni pada sekitar April dan Mei.

Dalam dua kejadian itu, tinggi air meningkat lebih signifikan akibat fenomena klimatologis, di mana ada siklon berputar di atas Sungai Kelay dan Segah. Hujan ekstrem yang terjadi dalam durasi lama membuat kapasitas lingkungan tidak mampu menampung debit air yang besar.

Dalam kejadian itu terdapat beberapa korban jiwa, ratusan hektar lahan pertanian rusak, ternak warga banyak dan hilang.

BPBD Berau terus menjalin komunikasi intens den-



gan BMKG Stasiun Tampung Merasa. Ketika ketinggian air mencapai 20 meter di atas permukaan laut, status siaga langsung diberlakukan.

“Kalau sudah siaga, kami informasikan ke camat untuk diteruskan ke kepala kampung di sekitar bantaran sungai, terutama kalau di hulu masih hujan,” ujarnya.

Pemantauan pun dilakukan setiap hari. Selain membuat laporan rutin, BPBD juga menurunkan tim ke lapangan, termasuk saat mendampingi Wakil Bupati meninjau beberapa titik terdampak.

“Warga sebenarnya sudah terbiasa kalau ketinggiannya masih pada level itu. Rata-rata rumah panggung, meski ada beberapa yang tetap terendam,” jelasnya.

Selain Kelay dan Segah, banjir juga kerap melanda sejumlah kecamatan lain. Potensi terbesar berada di Kecamatan Kelay yang alirannya

turun ke Sambaliung, Teluk Bayur, hingga Gunung Tabur.

“Suaran juga mulai terdampak kalau hujan besar. Bidukbiduk dan Teluk Sumbang juga rawan karena kawasan belakangnya merupakan daerah pegunungan,” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat bahwa banjir di Berau bisa menyamai skala besar seperti di Sumatera, BPBD menyebutkan, risiko tersebut kecil berdasarkan kajian yang tersedia. Namun, perubahan tutupan hutan menjadi faktor yang harus diwaspadai.

Dia juga mengaku, pihaknya belum mengkaji tutupan lahan secara detail di hulu Kelay dan Segah. Namun, bisa dikatakan, hampir setiap tahun terjadi pembukaan lahan untuk perkebunan, baik di dalam maupun luar kawasan.

“Termasuk yang dibuka oleh masyarakat sendiri. Ini jadi perhatian dan sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

BPBD menegaskan, penanganan bencana adalah

tanggung jawab bersama berbasis kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi.

Bahkan, di tiap kecamatan ada posko yang menangani kebakaran pemukiman, hutan, dan lahan, termasuk banjir dan longsor. Berau, kata dia, memiliki potensi bencana cukup tinggi, mulai banjir, longsor, kebakaran lahan, cuaca ekstrem, hingga abrasi sungai.

“Karena itu, kami imbau warga bantaran sungai untuk tidak menebang pohon yang berfungsi menahan kikisan arus dan resapan air,” ucapnya.

Meski banjir besar dinilai kecil, BPBD mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat hujan ekstrem berlangsung lebih dari empat jam.

“Kalau sudah ada siklon yang berputar di hulu Segah dan Kelay, dan hujan turun terus, risikonya tetap ada. Kami terus memantau dan menyampaikan peringatan dini ke wilayah-wilayah rawan,” tegasnya.

BACA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 3

BOM WAKTU BENCANA

Peristiwa banjir bandang yang membawa gelondongan kayu dari hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi alarm waspada bagi Kabupaten Berau.

Kontur hutan Berau yang berhadapan dengan pegunungan tinggi dapat berubah menjadi senjata pembunuh ketika fungsi hutan hanya dianggap sebagai komoditas ekonomi.

Pembukaan tutupan hutan dalam jumlah ratusan ribu hektare hingga saat ini adalah bom waktu dari tindakan pembabatan hutan yang masif.

Analisis spasial menggunakan data Geographic Information System (GIS) memberikan gambaran nyata kerusakan tersebut. Data Pusat Peta Batas Wilayah milik Badan Informasi Geospasial untuk empat kecamatan terdampak, yakni Kelay, Sambaliung, Teluk Bayur, dan Segah, menunjukkan tren penurunan drastis.

Pada 2000, tutupan hutan di wilayah ini seluas 1.268.733,89 hektare. Lalu, pada 2022, luasan itu berkurang menjadi 1.123.603,54 hektare.

Artinya, hanya dalam dua dekade, tutupan hutan hilang mencapai 145.130,45 hektare untuk berbagai kegiatan, mulai dari permukiman, perkebunan sawit, hingga pertambangan batubara.

Analisis Walhi Kaltim semakin mengungkap kedalaman masalah ini. Selama kurun waktu yang sama, Berau kehilangan hutan alam seluas 428.967,94 hektare yang beralih menjadi perkebunan sawit.

Ironisnya, merujuk data Minerba One Maps Indonesia (ESDM) 2018, terdapat 32 perusahaan tambang batu bara di empat kecamatan terdampak banjir dengan luas konsesi mencapai 76.413,01

hektare. Angka konsesi ini tergolong sangat besar, mengingat luas daratan Berau hanya sekitar 2,22 juta hektare.

Kekhawatiran yang didukung data ini diutarakan langsung oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis. Menurutnya, Berau sudah dieksploitasi sejak lama, bahkan praktik pertambangan telah dilakukan sejak era kolonial. Eksploitasi tidak hanya menyasar tambang, tetapi juga hutan serapan air.

"Berau ini sudah lama dieksploitasi, sudah cukup rasanya untuk terus dibabat hutan yang saat ini masih hidup," kata Gamalis.

la menyoroti industri perkebunan kelapa sawit yang dalam proses pembukaan lahan tidak menyisakan satu pohon pun, meratakan tanah yang seharusnya menjadi ruang bagi satwa dan penjaga keseimbangan alam.

"Kita tidak bisa tutup mata, itu benar-benar terjadi saat ini," ujarnya.

Gamalis menegaskan tidak ada lagi kompromi dalam menyikapi penggundulan hutan. Ia berpendapat, kawasan Hutan Adat dan Hutan Lindung harus diperluas, daripada terus mengeksploitasi hutan produksi yang menguntungkan korporasi.

"Kita harus melek, kalau ada ancaman bencana besar di depan kita," tuturnya.

Berkaca dari dahsyatnya bencana di Pulau Sumatera yang memakan korban jiwa dan kerugian triliunan akibat perusakan hutan, Gamalis yakin Berau masih bisa diselamatkan. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga hutan, bukan sekadar menanam kembali.

Gamalis juga merespons pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Masud, yang menyebut hutan di Kaltim masih sangat luas, yakni

sekitar 8 juta hektare, dengan kerusakan yang dianggap 'hanya' 60 ribu hektare. Ia menilai pernyataan itu tidak tepat jika diakumulasi secara sederhana. Sebab, Berau adalah daerah dengan angka deforestasi yang sangat luas dan dampaknya sudah dirasakan.

"Kita sudah belajar, pengalaman bencana kita sudah memakan banyak kerugian. Tidak bisa lagi kita kompromi dalam merawat hutan," ucapnya.

Menurutnya, meskipun dikenal istilah reboisasi, yang terpenting saat ini adalah menjaga hutan agar tidak dibabat lagi, alih-alih berpegangan pada harapan reklamasi pasca-tambang.

"Kenapa harus reboisasi? Kenapa tidak kita jaga saja yang ada saat ini," tegasnya.

DILEMA KEBIJAKAN

Meskipun kritik keras datang dari Wakil Bupati tentang pentingnya menjaga hutan yang ada, secara regulasi, perusahaan pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) memiliki kewajiban rehabilitasi.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat, Azhar Rudiyanto, menjelaskan, perusahaan diwajibkan melakukan reboisasi kawasan hutan, khususnya untuk memastikan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Rehab DAS).

Secara teknis, jika perusahaan memiliki izin PKH seluas 1.000 hektare, maka mereka wajib melakukan Rehab DAS seluas 1.100 hektare, atau 110 persen dari luasan izin.

"Itu sifatnya wajib, bila sudah selesai beroperasi," kata Azhar.

Azhar tidak memungkiri bahwa sektor pertambangan dan perkebunan adalah penyumbang utama degradasi hutan di Berau. Namun, ia membedakan hal ini dari praktik pembakaran hutan oleh masyarakat lokal untuk menanam padi.

Menurutnya, kegiatan menanam padi masih dianggap ramah lingkungan dan tidak berpengaruh terhadap kondisi banjir seperti saat ini.

Di balik kewajiban reboisasi, KPHP menghadapi dilema nyata terkait kepatuhan perusahaan. Azhar mengakui jumlah perusahaan pertambangan nakal yang mangkir dari kewajiban reklamasi dan reboisasi hutan belum diketahui secara pasti karena KPHP baru akan melakukan pemutakhiran data pada tahun ini.

Jejak kerusakan lama pun sudah terlihat jelas. Azhar memprediksi bahwa persentase hutan yang beralih fungsi dari total luasan yang ditangani KPHP Berau Barat, yang pada 2010 tercatat 5 persen, kini diprediksi meningkat hingga tiga kali lipat.

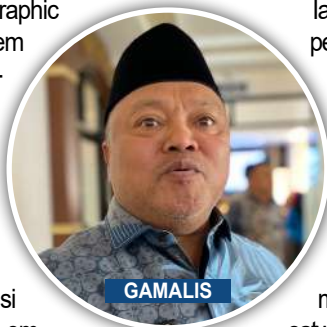
"Kami masih perlu melakukan digitasi dulu terkait itu," tegasnya.

Pada titik ini, Azhar juga menyoroti ironi lain. APBD Berau masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara. Ketergantungan ekonomi ini seringkali menjadi faktor yang menghambat penegakan aturan yang ketat terhadap industri ekstraktif.

Di tengah keterbatasan penegakan dan ketergantungan ekonomi, KPHP Berau Barat juga menjalankan program konservasi yang lebih proaktif. Salah satu program unggulan untuk menjaga ekosistem hutan adalah pembagian bibit gratis kepada masyarakat. Setiap pemilik KTP bisa mendapatkan 10 bibit.

Bantuan bibit ini didominasi 75 persen tanaman okulasi buah-buahan dan sisanya tanaman kehutanan seperti pohon ulin, mahoni, hingga trembesi.

"Silakan bagi siapapun bisa menggunakan fasilitas program ini," tutup Azhar. (*)



GAMALIS



AZHAR RUDIYANTO



Banjir Besar Tak Pernah Absen 4 Tahun Beruntun

KAMPUNG Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, kini menghadapi ancaman rutin: banjir besar dilaporkan terus terjadi setiap tahun dalam empat tahun terakhir.

Kepala Kampung Tumbit Dayak, Ahmad Jamlan, memastikan, sejak 2022-2025, peristiwa banjir berskala besar tidak pernah absen melanda wilayahnya.

“Kalau dihitung dari empat tahun terakhir ini, banjir besar itu ada terus setiap tahun. Pasti sekali dalam setahun,” kata Jamlan.

Banjir di Tumbit Dayak terbagi menjadi dua pola. Pola pertama adalah banjir genangan rutin yang umumnya terjadi pada rentang waktu Desember hingga Maret. Skalanya relatif kecil, hanya berupa genangan air di wilayah pinggir sungai dan dataran rendah.

“Biasanya dari bulan 12 sampai bulan 3 itu sering banjir, tapi paling naik di pinggir-pinggir saja,” katanya.

Pola kedua adalah banjir skala besar, yang merupakan kejadian paling diwaspadai. Banjir dengan skala yang sangat besar hanya terjadi satu kali dalam setahun, umumnya memuncak pada bulan Maret, April, atau Mei.

Setelah kejadian ekstrem tersebut, kondisi cenderung kembali normal dan air tidak berulang dalam waktu dekat.

“Kalau yang besar betul itu, paling sekali saja. Setelah itu tidak lagi,” jelasnya.

Terka it banjir yang terjadi menjelang akhir 2025, Jamlan memastikan ketinggian air belum mencapai tingkat kritis. Muka air masih jauh di bawah level ekstrem tahun sebelumnya.

“Yang bulan 12 ini belum besar seperti kemarin. Masih jauh. Kurang lebih satu meter lagi baru seperti yang dulu,” ungkapnya.

Meskipun demikian, ia menegaskan, pola banjir besar yang terjadi secara rutin setiap tahun tetap menjadi perhatian serius dan prioritas mitigasi bagi pemerintah kampung.

Peran Krusial BMKG Berau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Berau terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

Kepala BMKG Berau, Ade Heryadi, menjelaskan, timnya bekerja tanpa henti melakukan pemantauan cuaca secara komprehensif setiap hari. Tujuannya memastikan informasi yang disalurkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah selalu akurat dan tepat waktu.

BMKG Berau memanfaatkan berbagai instrumen canggih untuk mengumpulkan data, mulai dari peralatan ukur cuaca otomatis dan konvensional, citra radar cuaca, hingga citra satelit dari seluruh wilayah Indonesia.

“Melalui analisis ini, kami bisa mengidentifikasi potensi hujan lebat, cuaca ekstrem, angin kencang, hingga kondisi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” jelas Ade.

Seluruh data tersebut diolah untuk menghasilkan prakiraan cuaca harian, termasuk informasi curah hujan jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagai langkah mitigasi langsung, BMKG Berau secara rutin menerbitkan peringatan dini cuaca, memperba-

ruai citra radar secara berkala, dan mengeluarkan prediksi nowcasting (prakiraan saat ini) segera setelah indikasi cuaca ekstrem terdeteksi.

Informasi kritis ini disalurkan melalui berbagai kanal untuk memastikan langkah antisipasi dapat segera dilakukan sebelum dampak terjadi. Kanal-kanal tersebut meliputi media sosial resmi BMKG Berau, kanal resmi pemerintah daerah, website, hingga komunikasi langsung dengan instansi terkait kebencanaan.

Tidak hanya fokus pada cuaca harian, BMKG Pusat juga menyediakan informasi iklim jangka panjang seperti prakiraan musim, anomali curah hujan, serta potensi El Niño dan La Niña.

“Data ini sangat penting bagi sektor pertanian, penerbangan, perikanan, hingga lembaga kebencanaan, dalam menentukan langkah mitigasi,” imbuhnya.

Ade memastikan, secara keseluruhan, BMKG berperan memastikan bahwa informasi cuaca yang diterima masyarakat dan pemerintah bersifat akurat, cepat, dan relevan.

“Dengan demikian, risiko dan dampak bencana hidrometeorologi, dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya. (*)



ADE HERYADI





Banjir Siklus Alam VS Kerusakan Struktural

FENOMENA banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Berau memicu reaksi dari DPRD Berau, yang sama-sama menuntut mitigasi serius namun dengan fokus yang berbeda.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan, banjir bukanlah persoalan baru di Bumi Batiakkal. Ia berpendapat, banjir tidak selalu bisa dikaitkan dengan kerusakan hutan, melainkan telah menjadi siklus tahunan yang kerap dipengaruhi oleh fenomena alam dan cuaca ekstrem.

"Ini kita tidak bisa mengatakan 100 persen banjir itu terjadi karena hutan kita dirusak. Banjir ini memang setiap tahun dari dulu sudah sering terjadi," ujar mantan Kepala BPBD Berau ini.

Thamrin mengakui, saat masih aktif di BPBD, ia menyaksikan langsung betapa tingginya curah hujan sangat berpengaruh memicu ke-

naikan debit air di sungai-sungai besar Berau.

"Cuaca sangat berpengaruh. Saat hujan tinggi, debit air pasti tinggi. Jadi menurut saya ini lebih kepada fenomena alam," jelasnya.

Meskipun menyoroti faktor alam, Thamrin tetap meminta masyarakat, khususnya di bantaran sungai, untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia memuji sinergitas antara BPBD dan BMKG Berau yang memungkinkan prediksi akurat.

"Kalau di Kampung Mersa itu sudah banjir, maka kita harus waspada di hilir. Pasti banjir. Itu bagian dari mitigasi," tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan, terutama di sepanjang Sungai Segah dan Sungai Kelay, yang dinilai masih relatif baik dan harus dilindungi.

"Hutan ini menjadi resapan air. Kalau itu habis dibabat di hulu, tidak menutup kemungkinan bencana seperti di Suma-

tera terjadi di Berau," tegasnya.

Berbeda dengan Thamrin, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan, upaya mitigasi harus dilakukan lebih serius dengan fokus pada kerusakan struktural. Ia menilai kerusakan hutan dan pendangkalan sungai adalah dua faktor yang tidak boleh diabaikan.

Sumadi mendesak agar tidak ada lagi pembukaan hutan murni di wilayah Berau. Selain itu, hutan yang sudah gundul akibat aktivitas pertambangan diminta segera direhabilitasi dan tidak dibiarkan terbuka dalam jangka panjang.

Ia juga mendorong pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menginstruksikan perusahaan tambang mempertahankan struktur tanah di area konsesi.

Selain isu hutan, Sumadi menyoroti kondisi Sungai Kelay dan Segah yang menurutnya sudah mengalami pendangkalan cukup serius.

Ia menilai pengerukan perlu dilakukan, sehingga sungai dapat menampung debit air lebih besar dan mengalirkan air hujan langsung ke laut.

Secara umum, Sumadi menilai kesiapan mitigasi bencana pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Masih banyak lahan bekas tambang yang belum direklamasi dan sejumlah titik rawan belum tersentuh pemulihan lingkungan.

"Kita harus siap menghadapi musibah banjir. Maka perlu menyiapkan lebih dini daripada nanti sudah terjadi baru kita repot," tegasnya.

Dia juga meminta agar peralatan penanggulangan bencana, termasuk penambahan perahu karet untuk BPBD agar diperkuat.

Sumadi juga mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga lingkungan, terutama dengan menanam kembali pohon di wilayah-wilayah terbuka dan bekas pertambangan. (*)



THAMRIN



SUMADI



Berau Menanti “Bencana Cicilan”

AKTIVITAS pertambangan dan pembukaan lahan kelapa sawit di Kabupaten Berau kian meluas, bahkan merambah wilayah perkotaan. Aktivistik lingkungan memperingatkan, jika ekspansi ini tidak dikendalikan, ancaman bencana berskala besar hanya tinggal menunggu waktu.

Aktivistik Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Mustari Sihombing, menuturkan, bencana yang diterima Berau akibat maraknya industri ekstraktif sudah berlangsung lama, hanya saja sifatnya “dicihil”.

Mustari meyakini, Berau berpeluang besar mengalami hal serupa yang terjadi di Sumatera. Meskipun prosesnya tidak secepat dan sekonstan

di Sumatera, peristiwa banjir besar Berau pada Mei 2021 sudah membuktikan rusaknya ruang hidup. Ia secara spesifik menunjuk konsesi perusahaan besar, seperti Berau Coal, yang hampir mengkapling seluruh kawasan.

“Menurut kami tidak bisa kita pungkiri itu akibat maraknya industri ekstraktif. Situasi Berau itu kan sebenarnya tinggal menunggu waktu saja lagi,” ungkapnya.

Selain risiko banjir, Mustari juga menyoroti potensi longsor, mengingat deforestasi menghabsi kawasan yang

seharusnya dilindungi. Selain bencana longsor, dari sisi kondisi udara juga merupakan bagian dari bencana, karena dampaknya bagi kesehatan masyarakat di sekitar tambang.

Debu-debu dari aktivitas pertambangan batubara juga merupakan salah satu hasil dari aktivitas industri ekstraktif tersebut.

Mustari mendesak pemerintah dan perusahaan untuk memeriksa situasi kesehatan masyarakat di lingkungan tambang, terutama terkait masalah pernapasan, kulit, dan dampak zat berat.

Dampak aktivitas ekstraktif di Berau meluas jauh melampaui bencana fisik. Dampak lain yang dirasakan masyarakat adalah kehilangan sumber mata air akibat pemutusan aliran air bawah tanah yang diakibatkan penggalian batu bara.

Hasil riset yang pernah dibacanya menunjukkan, galian dari kedalaman 25-125 meter bakal memutus aliran air tersebut.

Pencemaran juga ditemukan ketika uji sampling, di mana tingkat derajat keasaman (pH) air di lingkungan tambang banyak yang melampaui standar Kementerian Kesehatan (harusnya sekitar 7, namun justru di bawah standar).

BACA SELINGKUPNYA DI HALAMAN 7



MUSTARI
SIHOMBING

Penurunan derajat keasaman air tersebut dipastikan karena aktivitas pertambangan, yang menyebabkan warga terserang gatal-gatal lantaran air terkontaminasi oleh limbah kandungan zat berat batubara. Ketika zat-zat itu bersentuhan dengan tubuh, akan merusak sel-sel tubuh, apalagi jika terus-menerus digunakan.

Mustari menegaskan, banjir yang melanda tiga kecamatan beberapa waktu lalu tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri di hulu. Berdasarkan riwayat kawasan, bencana rutin banjir tidak terjadi sebelum adanya aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit skala besar di bantaran Sungai Segah dan Kelay.

Kerusakan ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi di seluruh Kaltim, di mana banyak DAS dirusak, aliran sungai dipersempit, dan terjadi pendangkalan akibat aktivitas industri ekstraktif.

Mustari juga menggarisbawahi dampak perkebunan kelapa sawit skala besar yang secara otomatis mengubah bentang alam. Perkebunan mengubah vegetasi alami menjadi tanaman monokultur sawit.

Peracunan tanah lewat aktivitas pembukaan dan mengalirnya racun dari perkebunan ke sungai, yang membunuh biota, telah banyak terpotret oleh media. Kerusakan

ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang hidupnya bergantung pada sungai.

Pembukaan lahan sawit juga menjadi penyebab bencana banjir seperti yang pernah terjadi di Riau. Untuk mengantisipasi hal serupa, penanganan pembukaan perkebunan skala besar harus meninjau status kawasan, apakah masuk dalam kawasan hutan atau konservasi.

Inilah yang selalu ditabrak, di mana kawasan hutan dan kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi justru dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit atau pertambangan batubara.

TANTANGAN BERSAMA DAN KESEIMBANGAN EKOLOGIS

Aktivis lingkungan dari CAN Borneo, Paulinus Kristianto, menjelaskan, kondisi lingkungan di Berau saat ini berada pada fase perubahan yang cepat akibat perluasan sawit, pertambangan, dan berkurangnya tutupan hutan.

"Situasi ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi menjadi momentum bersama untuk mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologis," ungkap Paulinus.

Ia setuju meningkatnya

frekuensi banjir dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai perubahan iklim yang membuat hujan lebih ekstrem, dan perubahan tata guna lahan yang mengurangi daya serap air di suatu wilayah.

Namun, Paulinus mengingatkan, risiko bencana hidrometeorologi bisa meningkat apabila curah hujan ekstrem bertemu dengan tutupan lahan yang semakin terbuka di wilayah hulu.

Risiko-risiko yang bisa saja terjadi, menurutnya, bisa ditangani dengan tata kelola yang baik.

Mustari menyoroti, di Kaltim, tercatat ada 1.735 lubang tambang menganga dari 1.404 izin yang tidak ada tindakan tegas. Ia menegaskan bahwa pemerintah adalah dalang dari seluruh bencana yang terjadi hari ini karena izin yang mereka berikan. Masalahnya, pengawasan tidak berjalan baik sehingga perusahaan dengan entengnya meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka.

Untuk mengantisipasi hal buruk, Mustari menyarankan adanya kesadaran kolektif. Pemerintah harus lebih tegas menekan perusahaan untuk bertanggung jawab dari seluruh lubang yang ditinggalkan. Masyarakat juga harus

lebih sadar dan tegas menuntut, karena yang menjadi korban adalah warga di lingkaran tambang.

Paulinus menambahkan, upaya mengantisipasi situasi ini idealnya dilakukan secara bersamaan dan tidak hanya mengandalkan satu pihak.

Dalam hal ini pemerintah memiliki kesempatan untuk memperkuat peraturan tata ruang, meningkatkan pengawasan di tempat yang sekiranya berisiko, menggalakkan program rehabilitasi hutan dan mangrove, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung dengan prinsip berkelanjutan.

Perusahaan dapat meningkatkan pengelolaan sumber air, membuat zona penyangga, melakukan pemulihan kawasan pasca pertambangan, serta mematuhi standar lingkungan yang sudah ada.

Masyarakat dapat berkontribusi melalui pengawasan yang melibatkan partisipasi, merawat area-area penting seperti sempadan sungai, serta memberikan dukungan terhadap kegiatan konservasi dan penanaman kembali.

Perubahan besar akibat kegiatan tambang dan perkebunan dapat memberikan beberapa dampak ekologis yang jelas, seperti berkurangnya daya serap air, sedimentasi sungai, hilangnya vegetasi penahan erosi, terutama di daerah lereng atau hulu DAS, serta perubahan pola aliran air. (*)



PAULINUS KRISTANTO





MENGENAL KPAB BERAU, KOMUNITAS PECINTA ALAM YANG SUARAKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN



ADALAH Komunitas Pecinta Alam Batiwakkal (KPAB) Berau, sebuah komunitas yang terbentuk pada tahun 2021 dan dibentuk oleh para pemuda yang memiliki minat yang sama dalam kegiatan alam bebas.

Salah satu Anggota Muda KPAB Berau, Padelip Noya, mengatakan komunitasnya memiliki tujuan untuk mempromosikan kegiatan alam bebas yang bertanggungjawab serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

Padelip Noya menjelaskan, para pemuda penggiat

dan pecinta alam itu kemudian terbersit ide untuk membentuk komunitas yang berbentuk organisasi formal.

Menurut Padelip Noya komunitas ini terdiri dari 30 anggota aktif dan biasanya berkumpul di Jalan Raja Alam 1, Sambaliung, Berau.

"Komunitas ini dibentuk dengan alasan utama untuk wadah teman-teman penggiat, penikmat, maupun yang peduli dengan alam bebas dan pelestarian lingkungan," ungkapnya kepada Berauterkini.co.id

Padelip Noya menuturkan, kegiatan KPAB berupa hiking, camping, hingga kegiatan lingkungan maupun sosial seperti membersihkan lingkungan

dan membantu masyarakat yang terkena musibah kebakaran.

Dia mengatakan, KPAB telah menjelajahi sejumlah lokasi mulai dari Bendungan Suaran, Pulau Maratua, Gunung Mincau, Talisayan, hingga ke Gunung Bawakaraeng di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, keselamatan anggota menjadi hal utama saat KPAB melakukan kegiatan.

Karena itu, KPAB selalu memastikan perlengkapan keselamatan hingga memiliki tim yang terlatih dalam penanganan darurat.

"Kami juga melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan kegiatan," ungkapnya.

Dia menyampaikan, KPAB terbuka kepada semua warga Berau yang ingin bergabung ke dalam komunitas.

"Komunitas Pecinta Alam Batiwakkal Berau adalah tempat yang tepat untuk belajar



dan bertumbuh dalam segi membuat dan mengatur administrasi maupun kegiatan alam lainnya," jelasnya.

Dirinya berharap kehadiran KPAB dapat membawa manfaat dan menyebarkan pentingnya kesadaran soal kelestarian lingkungan hidup.

"Harapan kami adalah komunitas ini dapat terus berkembang dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan," katanya. **(ANDRIKNI SHOLIKHATI)**





1.105 Pekerja di Berau Terkena PHK

Sektor Pertambangan Mendominasi

DINAS Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau mencatat 1.105 pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang tahun ini.

Meski jumlahnya meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, Kepala Disnakertrans Berau, Zulkifli Azhari, memastikan bahwa seluruh hak normatif pekerja harus tetap dipenuhi oleh perusahaan.

Zulkifli Azhari menegaskan bahwa pemenuhan pesangon menjadi fokus utama pihaknya.

"Saya harus memastikan hak-hak normatif itu, hak-hak karyawan terpenuhi. Semua pesangonnya, sebarang, wajib dipenuhi. Kalau ada mutasi, harus dilaporkan. Yang tidak dimutasi dan menerima PHK, pastikan mereka meneri-

ma pesangon," tegasnya.

Menurutnya, kenaikan jumlah PHK tahun ini didominasi oleh sektor pertambangan. Khususnya akibat berhentinya operasional PT Buma di Berau.

Meski demikian, tidak semua pekerja terdampak langsung kehilangan pekerjaannya.

"Buma ini sebagian dimutasi ke pusat lain. Ada yang ambil pesangon, ada yang pindah ke cabang perusahaan mereka. Jadi konfliknya tidak begitu besar karena ada skema penempatan ulang," ujarnya.

Ia menyebut bahwa berakhirnya operasional pe-

rusahaan tambang menjadi konsekuensi dari produksi batubara yang habis.

"Kalau sumber daya sudah habis, pasti tutup. Tidak bisa diperbarui lagi. Tinggal cari kontrak baru atau peluang lain," tambahnya.

Meski PHK meningkat, Zulkifli menilai dampaknya terhadap angka pengangguran terbuka di Berau tidak terlalu signifikan. Salah satunya karena masih ada usaha-usaha dan perusahaan baru yang muncul.

Untuk menekan angka pengangguran, Zulkifli menekankan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dan

kemudahan investasi.

"Investasi harus kita jaga sama-sama. Kalau investasi berjalan, lapangan kerja terbuka. Inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi ikut baik," katanya.

Disnakertrans juga terus memperkuat pembinaan SDM, terutama melalui kerja sama dengan sekolah kejuruan dan pelatihan tenaga kerja baru. Dengan kolaborasi bersama SMK dan sekolah kejuruan.

Pihaknya tidak menetapkan target angka pasti penurunan pengangguran, namun memastikan tren penurunannya harus terjaga.

"Kita tidak punya target muluk-muluk. Yang penting tiap tahun turun. Tahun kemarin saja sudah turun dari 5 menjadi 4 persen," tutupnya. (DINI DIVA APRILIA)



ZULKIFLI AZHARI



Bikin Turis Nyaman Jelang Liburan

MENJELANG puncak libur Natal dan Tahun Baru 2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau mengingatkan bahwa kualitas pariwisata daerah tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi wisata semata.

Menurut Kepala Disbudpar Berau Ilyas Natsir, kualitas pariwisata juga terlihat dari kualitas layanan terhadap turis dari seluruh pihak, mulai dari pelaku wisata, OPD, hingga masyarakat umum.

Ilyas Natsir menyampaikannya, kunjungan turis diperkirakan meningkat signifikan pada libur Natal dan Tahun Baru nanti.

Dia mengatakan, Kondisi ini menuntut kesiapan bersama, bukan hanya sektor pariwisata.

"Untuk mengembangkan pariwisata ini kan tidak bisa hanya bertumpu pada satu instansi. Harus kolaborasi setiap OPD lewat program kerjanya masing-masing supaya ada hasil terhadap peningkatan kualitas destinasi dan pelayanan publik," ujarnya.

Menurut Ilyas Natsir, pariwisata adalah sektor yang menyentuh banyak hal mulai akses jalan, kebersihan, keamanan, hingga layanan kesehatan.

Karena itu, Pemkab Berau memerlukan dukungan penuh dari berbagai perangkat daerah dan masyarakat.

"Tidak bisa hanya Disbudpar yang bekerja. Pariwisata akan maju kalau semua

bergerak. OPD yang memperbaiki infrastruktur, menjaga kebersihan, memastikan keamanan, hingga menyediakan layanan publik yang ramah semua berperan penting," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi penentu kepuasan turis.

"Saat wisatawan merasa nyaman, aman, dan dilayani dengan baik, mereka akan kembali dan merekomendasikan Berau kepada orang lain," katanya.

"Masyarakat juga punya peran besar. Sikap ramah, menjaga kebersihan, dan ikut menjaga fasilitas adalah bentuk kontribusi nyata," katanya.

Atas dasar itu, Disbudpar Berau mengimbau seluruh pelaku wisata dan masyarakat di destinasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Mulai dari menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas wisata, menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses pengunjung.

Kemudian menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan dan menghindari praktik pungli atau tarif tidak wajar.

"Kita ingin wisatawan pulang membawa kesan positif. Untuk itu, layanan prima harus menjadi gerakan bersama," tutupnya.

Selain membuat turis nyaman, Disbudpar Berau juga bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari DLHK, BUMK hingga Pokdarwis dan pengelola tempat wisata untuk



memastikan kebersihan destinasi wisata.

Kabid Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar Berau, Samsiah melalui Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Disbudpar Berau, Asri mengungkapkan, ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

"Bagaimanapun juga kan kita ingin pengamanan, keamanan yang utama. Keamanan dan kebersihan tempat tersebut, sehingga orang tetap merasa nyaman untuk berwisata," ungkapnya kepada Berauterkini.co.id, Selasa (9/12/2025).

Dia mengatakan, kerja sama dengan DLHK guna memastikan sampah yang berada di lokasi destinasi wisata bisa terangkut.

"Misalnya di Maratua, di Derawan, dan di Biduk-Biduk mereka punya UPTD sendiri. Sehingga nanti, masyarakat merasa nyaman, atau wisatawan merasa nyaman pada saat berkunjung," ujarnya.

Disbudpar Berau juga

berkoordinasi dengan Pokdarwis guna memastikan kebersihan di lokasi destinasi wisata.

"Jadi kalau misalnya jorok kan orang pasti negatif gitu ya, pikirannya, aduh sudah bagus tempatnya tapi kok sampahnya berhamburan," jelasnya.

"Kita terus berupaya untuk orang sama-sama memahami bahwa pertama, jangan membuang sampah sembarangan," ujarnya.

Tak hanya itu, Disbudpar Berau juga mengimbau kepada turis yang berkunjung ke Berau untuk mengurangi sampah plastik.

Salah satunya dengan menggunakan atau membawa botol minuman seperti tumbler untuk mengurangi konsumsi minuman dalam kemasan.

"Kalau bisa pergi dengan, misalnya dengan tumbler-nya," katanya.

"Jadi biasanya kita melalui juga personal gitu ya. Jadi secara pribadi kita menyadari dan kesadaran itu kita harus temukan sama-sama di sana," jelasnya. **(DINI DIVA APRILIA/ANDRIKNI SHOLIKHATI)**



Berau Terkini
tak berhenti

DIREKSI

Komisaris : M. Syaifuddin Zuhrie
Direktur : Rengkuh Enggalingtyaz, **Digital Marketing Manager** : Aidil Anugrah, **Ikhtan** : Siti Nur Ariska, **Admin** : Tariska Ramadayani

Advokat & Konsultan Hukum : Firma Hukum H.A.M & Partner

Email Redaksi : berauterkini2023@gmail.com, Iklan dan informasi : berauterkini2023@gmail.com

Alamat Redaksi : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, Telepon : 0851-6366-0045

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi : Robithoh Johan Palupi,
Koordinator Liputan : Rusdiyono, **Editor** : Maulana Ilhami Fawdi, **Reporter** : Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Adriani Sholikhati, **Grafis** : Surya Adji Permana, **Media Sosial** : Siti Nur Ariska, **IT & Web Development** : Fathurrohman.